



PROSES PENGURUSAN DOKUMEN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KAPAL OLEH PT. MULTI LINE BORNEO DI ERA DIGITALISASI

Aditya Yuriady^{✉ 1}, Hidayati Desy²

Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin, Indonesia ¹

Info Artikel

Abstrak

Sejarah Artikel:

Diterima

15 Juni 2026

Disetujui

16 Juli 2026

Dipublikasikan

05 September 2026

Penelitian ini membahas proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal oleh PT. Multi Line Borneo dalam konteks perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Sertifikat kapal merupakan dokumen penting yang menjamin kelayakan dan keselamatan pelayaran, sehingga perpanjangan sertifikat menjadi kewajiban hukum bagi pemilik maupun operator kapal. Namun, sebelum adanya digitalisasi, proses pengurusan seringkali menghadapi kendala berupa birokrasi yang panjang, keterlambatan, serta kurangnya transparansi. Dengan diterapkannya sistem layanan berbasis digital, seperti *Sistem Informasi Manajemen Kapal* (SIMKAPEL), proses administrasi menjadi lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati meliputi: *fleksibilitas, koherensi dan konsistensi, prioritas data, sensitivitas kontekstual deskriptif, alamiah (natural setting), insider/outsider perspektif, reflektif dan subjektif.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan utama dalam proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal meliputi: (1) permohonan dokumen perpanjangan sertifikat kapal dari pemilik kapal; (2) pengumpulan kelengkapan dokumen kapal; (3) mengajukan permohonan ke dalam sistem SIMKAPEL; (4) penginputan data ke dalam sistem SIMKAPEL; serta (5) penerbitan sertifikat perpanjangan dalam bentuk digital maupun cetak. Setiap tahapan menunjukkan adanya efisiensi dibandingkan dengan proses manual.

Abstract

Keywords:

Proses, Pengurusan, Dokumen, Sertifikat, Kapal, Digitalisasi

This study discusses the process of managing the renewal of ship certificate documents by PT. Multi Line Borneo in the context of technological development and the digitalization era. A ship certificate is an essential document that guarantees the seaworthiness and safety of navigation, making its renewal a legal obligation for ship owners and operators. However, prior to digitalization, the management process often faced obstacles such as lengthy bureaucracy, delays, and a lack of transparency. With the implementation of digital-based services, such as the Ship Management Information System (SIMKAPEL), administrative processes have become more efficient, accountable, and integrated.

The type of research employed is qualitative, as a research procedure that produces descriptive data in the form of spoken or written words from people or observed behavior. This method includes aspects of flexibility, coherence and consistency, data prioritization, contextual sensitivity, descriptiveness, natural setting, insider/outsider perspective, reflexivity, and subjectivity.

The research results show that the main stages in the process of managing ship certificate renewal documents include: (1) submitting a renewal request by the shipowner; (2)

collecting the required ship documents; (3) submitting the application through t. SIMKAPEL system; (4) entering the data into the SIMKAPEL system; and (5) issuing t. renewed certificate in both digital and printed formats. Each stage demonstrates great efficiency compared to the manual process..

© 2026 Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin

✉ Alamat korespondensi:

E-mail: Aditya_yuriadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dokumen kapal merupakan salah satu aspek utama yang mendukung operasional pelayaran serta menjadi faktor penting dalam keberlangsungan proses pelayaran. Pengelolaan dokumen yang teratur akan membantu mewujudkan administrasi yang tertib sekaligus mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan.

Pengurusan dokumen kapal melibatkan prosedur administratif yang kompleks untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal yang melibatkan pengumpulan data, verifikasi dokumen, pengisian formulir digital, pengunggahan berkas melalui sistem SIMKAPEL, hingga komunikasi dengan instansi terkait seperti Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang semuanya dilakukan secara terintegrasi dan efisien melalui platform digital untuk mempercepat serta mempermudah proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal. Namun, pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal seringkali menghadapi berbagai kendala. Sebelum adanya sistem berbasis digital, proses administrasi dilakukan secara manual melalui tatap muka dan dokumen fisik. Hal ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan menjadi relatif lama, rawan terjadi kesalahan data, serta kurang transparan dalam alur pengurusan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan pelayaran, termasuk PT. Multi Line Borneo, yang harus memastikan semua armada kapalnya memiliki sertifikat sah dan berlaku agar tetap dapat beroperasi secara legal..

Seiring perkembangan teknologi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meluncurkan *Sistem Informasi Manajemen Kapal* (SIMKAPEL) sebagai sarana untuk mendukung transformasi digital dalam layanan perkapalan. Kehadiran sistem ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengurusan dokumen sertifikat kapal. PT. Multi Line Borneo sebagai salah satu perusahaan pelayaran turut memanfaatkan digitalisasi ini untuk mempercepat proses perpanjangan sertifikat, mengurangi hambatan birokrasi, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan era modern.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati, meliputi: *fleksibilitas*, *koherensi* dan *konsisten*, *prioritas data*, *sensitivitas konteks*, *deskriptif*, *alamiah*

(*natural setting*), *insider/outsider perspektif*, *refleksif* dan *subjektif* (Nusa Putra, 2013) Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau sumber asli (Markamah Ika Putri, 2025). Sedangkan, data sekunder adalah jenis data yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, sehingga dapat digunakan kembali untuk keperluan tertentu tanpa harus melakukan pengumpulan data dari awal (Irhan Hisyam Dwi Nugroho, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengurusan Dokumen Perpanjangan Sertifikat Kapal oleh PT. Multi Line Borneo di Era Digitalisasi

Berdasarkan hasil penelitian, proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal oleh PT. Multi Line Borneo menunjukkan adanya peningkatan efektivitas setelah diterapkannya sistem berbasis digital. Sebelumnya, pengurusan sertifikat dilakukan secara manual dengan menyerahkan dokumen fisik kepada instansi terkait. Proses ini memerlukan waktu cukup lama, sering menimbulkan antrean pelayanan, serta rawan terjadi kesalahan administrasi. Dengan adanya penerapan *Sistem Informasi Manajemen Kapal* (SIMKAPEL), sebagian besar kendala tersebut dapat diminimalisir.

Tahapan utama dalam proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal meliputi: (1) permohonan dokumen perpanjangan sertifikat kapal dari pemilik kapal; (2) pengumpulan kelengkapan dokumen kapal seperti surat ukur, surat laut/pas besar/pas kecil, sertifikat keselamatan konstruksi, sertifikat keselamatan perlengkapan, sertifikat keselamatan radio, sertifikat klasifikasi kapal, sertifikat ilr, pmk, hr, dan surat izin komunikasi radio ; (3) penginputan data ke dalam sistem SIMKAPEL; (4) penginputan data ke dalam sistem SIMKAPEL; serta (5) penerbitan sertifikat perpanjangan dalam bentuk digital maupun cetak. Setiap tahapan menunjukkan adanya efisiensi dibandingkan dengan proses manual..

Meski demikian, penerapan sistem digital ini masih menemui sejumlah tantangan. PT. Multi Line Borneo menghadapi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet, keterbatasan server, serta kurangnya pemahaman sebagian pengguna terhadap prosedur dalam SIMKAPEL. Faktor literasi digital menjadi tantangan

tersendiri karena tidak semua staf terbiasa menggunakan sistem daring. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan internal, pendampingan teknis, serta koordinasi intensif dengan pihak regulator.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya jejak digital dalam setiap tahapan, proses pengurusan menjadi lebih jelas dan dapat dipantau secara real-time. Hal ini meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan otoritas terkait, sekaligus meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Secara keseluruhan, penerapan digitalisasi dalam pengurusan perpanjangan sertifikat kapal di PT. Multi Line Borneo terbukti mampu mendukung efisiensi, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat kepatuhan terhadap regulasi maritim.

B. Kendala dan Solusi yang dihadapi oleh PT. Multi Line Borneo dalam proses pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal di era digitalisasi

Dalam penerapan sistem digital untuk pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal, PT. Multi Line Borneo menghadapi berbagai kendala yang berhubungan dengan aspek teknis, sumber daya manusia, serta regulasi dan koordinasi. Meskipun digitalisasi membawa banyak kemudahan, hambatan-hambatan tersebut tetap menjadi tantangan yang harus diatasi agar proses pelayanan dapat berjalan optimal.

Kendala Teknis: Sistem *Sistem Informasi Manajemen Kapal* (SIMKAPEL) sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Di beberapa wilayah pelabuhan, jaringan internet masih terbatas sehingga memperlambat proses penginputan data dan pengunggahan dokumen. Selain itu, server SIMKAPEL kadang mengalami gangguan (*down*) terutama pada jam sibuk, yang menyebabkan proses verifikasi tertunda. Solusinya yaitu perusahaan menyiapkan jaringan internet cadangan (*backup connection*), melakukan penginputan dokumen pada jam di luar beban puncak, serta menjalin komunikasi dengan tim teknis Kementerian Perhubungan agar kendala server dapat segera ditangani.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM): Tidak semua staf memiliki literasi digital yang memadai. Sebagian pegawai masih terbiasa dengan cara manual sehingga mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur SIMKAPEL, seperti kesalahan input data, format dokumen yang tidak sesuai, atau keterlambatan dalam melengkapi persyaratan. Solusi nya yaitu perusahaan menyelenggarakan pelatihan internal secara berkala, menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) penggunaan SIMKAPEL yang mudah dipahami, serta menugaskan staf pendamping untuk membantu pegawai yang mengalami kendala teknis.

Kendala Regulasi dan Koordinasi: Perbedaan pemahaman antara perusahaan

dan pihak regulator mengenai persyaratan dokumen sering menjadi kendala. Misalnya, ada ketidaksamaan persepsi tentang kebutuhan dokumen tambahan seperti sertifikat perlengkapan atau izin radio komunikasi. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam verifikasi terkadang tidak sinkron sehingga memperlambat penerbitan sertifikat. Solusinya yaitu perusahaan aktif melakukan konsultasi dengan otoritas pelabuhan dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai regulasi. Rapat koordinasi juga dilakukan secara rutin agar terdapat keselarasan pemahaman mengenai alur prosedur dan persyaratan antar pihak terkait.

Kendala Non-Teknis Lainnya: Adanya resistensi sebagian pihak internal yang masih merasa lebih nyaman menggunakan sistem manual. Kebiasaan lama ini menimbulkan keterlambatan adaptasi terhadap sistem digital. Selain itu, waktu pelayanan yang terbatas karena banyaknya permohonan juga menjadi kendala tersendiri. Solusinya yaitu manajemen perusahaan mendorong budaya kerja berbasis digital dengan memberikan pemahaman bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, perusahaan mengatur jadwal pengurusan dokumen secara terencana agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.

SIMPULAN

Pengurusan dokumen perpanjangan sertifikat kapal oleh PT. Multi Line Borneo merupakan suatu kewajiban penting untuk memastikan bahwa kapal yang beroperasi tetap memenuhi standar keselamatan pelayaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya sistem digital seperti SIMKAPEL, perusahaan dapat melaksanakan setiap tahapan mulai dari pengisian data kapal, pengunggahan dokumen, pembayaran PNBP, hingga penerbitan sertifikat dengan lebih cepat, praktis, dan transparan. Hal ini memberikan kemudahan dalam menjaga kelengkapan dokumen kapal serta meningkatkan efektivitas operasional perusahaan di bidang pelayaran. Namun demikian, penerapan digitalisasi tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala tersebut berupa keterbatasan pemahaman sebagian pengguna terhadap sistem aplikasi, gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta adaptasi digital yang belum merata di kalangan pemilik maupun operator kapal.

Diperlukannya upaya strategis dalam bentuk menyiapkan jaringan internet cadangan, pelatihan internal secara berkala, melakukan konsultasi dengan otoritas pelabuhan dan Kementerian Perhubungan, serta mendorong budaya kerja berbasis digital dengan memberikan pemahaman bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. A. (2021). *Manajemen Transportasi Laut dan Kepelabuhanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2021). *Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Inaportnet untuk Perusahaan Keagenan Kapal*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.
- Han Hisyam Dwi Nugroho. (2024, April 29). *About Us Dibimbing.Id*. Retrieved from Dibimbing.Id: <https://dibimbing.id/blog/detail/data-sekunder-pengertian-cara-memperoleh-contoh>
- Irawan, H. (2020). *Digitalisasi Prosedur Pelayaran di Era Industri 4.0*. Surabaya: Penerbit Maritim Indonesia.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Kapal Berbendera Indonesia*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kristiantoro, B. (2019). *Hukum Maritim dan Peraturan Internasional (SOLAS & MARPOL)*. Semarang: Universitas Maritim Press.
- Lasmono, S. (2020). *Kelaiklautan Kapal dan Pencegahan Pencemaran Perairan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Markamah Ika Putri. (2025, Mei 17). *About us Tirto.Id*. Retrieved from Tirto.Id: <https://tirto.id/sumber-data-primer-dan-data-sekunder-haUM>
- Nugraha, A., & Saputra, D. (2023). Analisis Efektivitas Digitalisasi Dokumen Kapal terhadap Waktu Tunggu (*Dwelling Time*) di Pelabuhan Indonesia. *Jurnal Logistik dan Transportasi Laut*, 11(2), 85-98.
- Nusa Putra. (2013). *METODE PENELITIAN : Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Prasetyo, B. (2022). Implementasi E-Certificate dalam Transformasi Digital Layanan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Penelitian Perhubungan Laut*, 14(1), 12-25.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Pelayaran)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, M., & Wijaya, K. (2021). Peran Agen Pelayaran dalam Percepatan Proses Perpanjangan Sertifikat Kapal Melalui Sistem Inaportnet. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Maritim*, 9(3), 45-57.
- Sudjatmiko. (2022). *Manajemen Keagenan Kapal dan Operasional Pelabuhan*. Jakarta: Penerbit Buku Maritim.
- Utomo, R. (2023). Tantangan Keamanan Siber dalam Digitalisasi Dokumen Maritim di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi Kelautan*, 5(1), 30-42.

Wibowo, A. (2021). Administrasi Pelayaran dan Dokumentasi Kapal Niaga. Surabaya: Hang
Tuah University Press.